

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PETANI LADA PUTIH DI DESA BALAMBANO
KECAMATAN WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR**

**IRMA KUMALASARI
Nomor Stambuk: 105 640 123 411**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2016**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PETANI LADA PUTIH DI DESA BALAMBANO
KECAMATAN WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan diajukan oleh

IRMA KUMALASARI

Nomor Stambuk: 105 640 123 411



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2016**

PERSETUJUAN

Judul skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan
Masyarakat Petani Lada Putih Di Desa
Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten
Luwu Timur

Nama Mahasiswa : Irma Kumalasari

Nomor Stambuk : 105 640 123 411

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Dr. H. Lukman Hakim, M.Si

Drs. Muhammad Tahir, M.Si

Mengetahui:

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Dekan Fisipol Unismuh Makassar

Fisipol Unismuh Makassar

Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Andi Luhur Prianto, S.Ip, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah di terima Oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi dekan fisipol universitas muhammadiyah makassar, nomor surat : 490/FSP/A.1-VIII/XI/37/2016 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada hari sabtu tanggal 14 bulan November tahun 2015.



1. Dr.H.Muhlis Madani, M.Si (Ketua) ()
2. Dr.Hj.Ihyani Malik, S.Sos, M.Si ()
3. Dr H .Lukman Hakim, M.Si ()
4. Drs.Muhammad Tahir, M.Si ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Irma kumalasari

Nomor Stambuk : 105 640 123 411

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademi.

Makassar , 20 agustus 2016

Yang menyatakan,

Irma kumalasari

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Lada Putih di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr.H. Lukman Hakim, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Muhammad Tahir, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Dr.H. Muhlis Madani, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Andi Luhur Prianto, S.Ip, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

4. Kedua Orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.
5. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak member saran, dukungan, dan motivasi kepada penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.



DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian karya Ilmiah	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II. PEMBAHASAN	
A. Konsep Peran Pemerintah	9
B. Konsep Pemerintah Daerah.....	11
C. Konsep Pemberdayaan	13
D. Konsep Peran Pemberdayaan	17
E. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	20
F. Tahap-tahap Pemberdayaan	21
G. Pertanian Lada Putih	22
H. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat	26
I. Kerangka Pikir	27
J. Fokus Penelitian.....	30
K. Deskripsi Fokus Penelitian.....	30
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	32
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	33
D. Informan Penelitian.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	34

G. Pengabsahan Data	35
BAB VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Karakteristik Objek Penelitian	37
1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur	37
2. Profil Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Luwu Timur	39
3. Profil Kecamatan Wasuponda.....	44
B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Lada Putih	52
1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Penyuluhan Dan Pelatihan.....	56
2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Pengembangan Fasilitas Petani.....	62
C. Faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pemberdayaan Masyarakat petani lada putih di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur	63
a. Faktor Pendukung	63
b. Faktor penghambat.....	65
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia menghadapi banyak sekali persoalan. Dua dari sekian banyak persoalan tersebut dan saling bertentangan adalah soal pengetasan kemiskinan serta pengelolaan ekonomi dan pembangunan. Data statistik selalu melaporkan bahwa angka kemiskinan kian tumbuh dan berkembang.

Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan telah banyak digelontorkan oleh pemerintah. Salah satu program prioritas pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan empat klaster, yaitu klaster pertama, pemberian bantuan langsung kepada masyarakat melalui program-program seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), klaster dua, pemberian bantuan modal kepada masyarakat melalui program-program berbasis pada pemberdayaan masyarakat, seperti program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan dan perkotaan, klaster tiga, pemberian modal kepada kelompok masyarakat yang sedang tumbuh berkembang dalam kelompok usaha melalui program-program seperti kredit usaha rakyat, klaster empat, pemberian dana oleh pemerintah kepada masyarakat untuk renovasi dan pemugaran rumah tidak layak huni melalui program-program perumahan rakyat. Upaya penanggulangan laju kemiskinan melalui pencanangan berbagai kebijakan nasional tersebut ternyata tidak cukup berhasil. Negara

tampaknya tidak cukup mampu mengatasi berbagai fenomena sosial yang saat ini berkembang.

Kebijakan pertanian mempengaruhi kehidupan semua orang, termasuk kesejahteraannya. Reaksi setiap orang terhadap suatu kebijakan akan berbeda-beda tergantung pada keadaan masing-masing dan dampak kebijakan tersebut pada pendapatan, kekayaan, dan kepentingan lainnya. Kebijakan pertanian merupakan *public policy* di bidang pertanian, salah satu bentuk *social control* untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya tujuan pembangunan pertanian dan isi pokok tujuan pembangunan pertanian tersebut ada kesamaannya walaupun dengan rumusan dan tekanan yang berbeda-beda yaitu untuk meningkatkan produksi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pemerataan kegiatan pembangunan pertanian dengan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup, pelestarian sumberdaya, dan sebagainya.

Pembangunan pertanian di era kini dan masa yang akan datang semakin dituntut untuk mewujudkan pertanian yang modern, efisien, berdaya saing dan semakin bersahabat dengan lingkungan. Karena hanya dengan pendekatan itu pertanian berkelanjutan dapat diwujudkan. Karakteristik globalisasi yang didasarkan pada persaingan bebas, mengisyaratkan bahwa konsep dan strategi pembangunan pertanian harus mampu mengantisipasi dan mengatasi tidak hanya persoalan-persoalan domestik, tapi juga dalam perspektif global. Di era 80an, pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) menjadi paradigma bagi Negara-negara berkembang dalam mencanangkan pembangunan Negara yang menitik tekankan pada pembangunan sumber daya manusia sebagai subyek

pembangunan. Berpijak dalam kerangka itu, maka pembangunan Negara yang bertumpu pada sumber daya manusia harus diletakkan pada pandangan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Strategi kebijakan itu, harus menjadi pandangan semua pihak dalam mengambil keputusan, yang diletakkan pada kerangka pembangunan partisipatif.

Pembangunan partisipatif meletakkan masyarakat dalam subyek pembangunan yang salah satu pilar utamanya adalah dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pada pandangan itu, maka penanganan program-program pemberdayaan masyarakat (*social envorement*) yang harus diletakkan pada pengembangan modal social, tidak hanya pada pengembangan ekonomi semata, dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Lada (*Piper Nigrum L*) merupakan salah satu jenis rempah yang merupakan komoditas andalan ekspor bagi Indonesia. Pasokan lada Indonesia dalam perdagangan dunia sebagian besar dipenuhi dari desa balambano kabupaten luwu timur yaitu lada putih dengan sebutan *Muntok White pepper*. Prospek lada yang tetap cerah ini antara lain disebabkan karena berkembangnya usaha makanan, berkembangnya industri jamu farmasi, kosmetika yang menggunakan lada sebagai salah satu bahan baku, meningkatnya konsumsi dunia, konsumsi dalam negeri semakin meningkat dengan bertambahnya produk-produk industri makanan berbasis lada.

Hampir seluruh pertanaman lada (99,7%) diusahakan oleh rakyat, sehingga dapat berperan sebagai penyedia lapangan kerja dan sebagai sumber pendapatan petani. Mengingat hampir seluruh pertanaman lada diusahakan oleh rakyat,

maka dalam meningkatkan produktivitas lada masih menghadapi berbagai permasalahan. Kenyataan yang harus diakui bahwa pertanaman lada di Indonesia sebagian besar dibangun oleh petani dengan skala usaha yang relatif kecil. Keadaan pelaku usaha pertanian tersebut setiap tahun semakin bertambah jumlahnya dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Skala usaha pertanian yang masih kecil juga menghambat petani dalam meningkatkan pendapatannya sehingga sulit ke luar dari lingkaran kemiskinan. Permasalahan umum yang dihadapi dalam usahatani lada antara lain adalah:

1. Rendahnya produktivitas tanaman karena banyaknya tanaman tua dan rusak, serangan hama penyakit, belum menggunakan benih unggul serta kurangnya pemeliharaan tanaman.
2. Mutu produk pada umumnya masih rendah, produk masih berbentuk primer dan pengolahannya masih tradisional.
3. Rantai tata niaga belum efisien, informasi pasar belum berkembang di sentra produksi dan harga yang diterima petani masih rendah.
4. Koperasi dan asosiasi petani belum optimal yang mengakibatkan posisi tawar lemah.
5. Kemitraan antara petani dengan perusahaan yang bergerak di komoditas ini belum optimal.
6. Terbatasnya permodalan dan fasilitas kredit untuk petani.

Di pasar internasional, lada Indonesia mempunyai kekuatan dan daya jual tersendiri karena cita rasanya yang khas. Lada Indonesia dikenal dengan nama *Muntok white pepper* untuk lada putih. Sebagian besar (99%) pertanaman lada

diusahakan dalam bentuk perkebunan rakyat dengan pengelolaan yang tradisional, antara lain penggunaan pupuk dan obat-obatan terbatas atau tidak sesuai anjuran, penggunaan bibit asalan, dan pengelolaan hasil tidak higienis. Pada setiap penanaman tersebut terdapat berbagai permasalahan antara lain pengadaan sarana produksi belum efisien, bibit unggul dan pupuk sulit diperoleh dan keberadaannya tidak tepat waktu, teknologi budi daya masih konvensional, teknologi pengelolaan kurang higienis, serta peran kelembagaan tani dan pemasaran kurang mendukung. Menurut Anwas (2013: 50) bahwa dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna: dorongan atau motivasi, bimbingan, atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

Pembangunan pertanian ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam rangka mengurangi kesenjangan dan memperluas kesempatan kerja, serta mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang terjadi sebagai dampak dari globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia pertanian yang berkualitas dan handal, dengan memiliki ciri adanya kemandirian, profesionalitas, berjiwa wirausaha (*entrepreneurship*), berdedikasi, etos kerja yang tinggi, disiplin dan moral yang luhur serta berwawasan global. Sehingga petani dan pelaku usaha pertanian lainnya akan mampu membangun usaha tani yang berdaya guna dan berdaya

saing. Salah satu upaya untuk meningkatkan kemandirian adalah melakukan pemberdayaan kepada petani, salah satunya adalah melalui kegiatan pembinaan kelompok tani yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena petani merupakan salah satu pelaku utama pembangunan pertanian dan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia, dengan demikian keberhasilan pembangunan pertanian lebih banyak ditentukan oleh petani itu sendiri dalam kenyataannya tidak terlepas dari bimbingan dari pemerintah daerah yang selalu melakukan pemberdayaan kepada petani bagaimana cara bertani dengan baik dan dengan adanya pemberdayaan kepada petani membuat para petani mempunyai keterampilan dan mampu mandiri.

Agar tujuan tersebut dapat dicapai maka perlu dilakukan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat maka sangat perlu namanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada petani agar masyarakat mempunyai keterampilan atau pengetahuan bagaimana cara bertani dengan baik sehingga petani tersebut mampu mandiri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan kecerdasan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan, dengan adanya pemberdayaan diharapkan semua informasi pertanian yang berkembang dapat diserap dan diterima oleh karena semakin banyak informasi yang dimanfaatkan oleh petani maka semakin efektif pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam upaya pengembangan lada putih, yang dinamis, dimana para petani mempunyai disiplin tanggung jawab dan terampil dalam

kerjasama mengelola kegiatan usaha taninya serta dalam upaya meningkatkan skala usaha dan peningkatan usaha kearah yang lebih besar dan bersifat komersil.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengangkat masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Lada Putih Di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, hal pokok yang merupakan pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Lada Putih Di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur?
2. Faktor apa yang mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat Petani Lada Putih Di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka penelitian bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Lada Putih Di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur.
2. Mengetahui Faktor apa yang mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat Petani Lada Putih Di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur?

3. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Di tinjau dari segi (manfaat teiritis). Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan dan pengetahuan bagi peneliti lebih lanjut.
2. Di tinjau dari segi (manfaat praktis). Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan peneliti dalam hal mempelajari bagaimana peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani lada putih di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran Pemerintah

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti sandiwara (filem), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Berdasarkan kamus ilmiah populer yang disusun oleh Tim Prima Pena (2000:367) memberikan pengertian peran dan peranan sebagai berikut: Peran yakni laku, hal berlaku atau bertindak: pemeran, pelaku; pemain (film atau drama). Sedangkan peranan adalah fungsi kedudukan, bagian kedudukan. Berbicara tentang peranan, maka kita tidak menghindarkan diri dari persoalan status atau kapasitas seseorang atau suatu lembaga karena setiap status sosial atau jabatan yang diberikan kepada setiap orang atau kepada suatu institusi pasti disertai dengan kewenangan. Kewenangan atau peran yang harus dilaksanakan oleh orang atau institusi tersebut.

Pengertian peran menurut Soekanto (1990:268) peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Dari hal di atas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban Dinas perhubungan dan penegakan

hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh.

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut misalnya Dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata (Soerjono Soekanto).

Menurut Siagian (2009:142) mengatakan bahwa pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan nasional. Peranan pemerintah yang disoroti yaitu:

1. Peran selalu stabililator, pemerintah selaku stabililator yaitu dalam hal mewujudkan perubahan tidak berubah jadi gejolak sosial, apalagi yang dapat merupakan ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa.
2. Peran selalu inovator, inovator merupakan salah satu produk dari kreatifitas, ditinjau dari administrasi pembangunan, inovasi berarti penemuan baru, metode baru, sistem baru dan yang terpenting cara berfikir yang baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya, pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi.
3. Peranan sebagai modernisator, pemerintah bertugas untuk menggiring masyarakat kearah kehidupan modern, pengalaman dibanyak Negara menunjukkan bahwa agar pemerintah mampu memainkan peranan penting

itu, maka proses modernisasi harus terjadi di lingkungan birokrasi pemerintah sendiri.

4. Peran selaku pelopor, pemerintah harus memainkan peranan sebagai pelopor dalam berbagai segi kehidupan bernegara, dengan perkataan lain, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi seluruh masyarakat.
5. Peran selaku pelaksana sendiri, pemerintah masih dituntut untuk memainkan peran selaku pelaksana sendiri berbagai kegiatan meskipun diharapkan bahwa makin maju suatu masyarakat makin berkurang pula identitas peranan tersebut.

B. Fungsi Dan Peran Pemerintah

Dalam setiap sistem perekonomian pemerintah selalu memainkan peran sangat penting. Melalui teori Adam Smith mengemukakan bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi, yaitu:

1. Fungsi pemerintah untuk memelihara pertahanan dan keamanan negara.
2. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan.
3. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.

Dalam perekonomian modern fungsi dan peranan pemerintah pun mengalami perubahan sebagai berikut:

- a. Peran alokasi adalah peran pemerintah untuk menghasilkan dan mengusahakan agar pengalokasian sumber-sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal.

- b. Peran distribusi adalah peran pemerintah untuk mengusahakan agar distribusi pendapatan ditengah masyarakat menjadi merata guna dan mensejahterakan masyarakat.
- c. Peran stabilisasi adalah peran pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja serta stabilitas harga barang-barang kebutuhan ekonomi yang mantap dan tingkat pertumbuhan yang menandai.

Sedangkan dalam pemerintahan suatu negara, pemerintah mempunyai peran dalam perekonomiannya. Menurut Adam Smith peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam:

- a. Peran aloksi yaitu merupakan fungsi pemerintah untuk mengalokasikan sumber-sumber dan agar lebih optimal penggunaannya.
- b. Peran distribusi yaitu merupakan fungsi pemerintah untuk menyesuaikan pembagian pendapatn dan mensejahterakan masyarakat.
- c. Peran stabilisasi yaitu merupakan fungsi pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja serta stabilitas harga barang-barang kebutuhan ekonomi yang mantap.

C. Konsep Pemerintah Daerah

Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat di katakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu Negara (daerah Negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu Negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Dalam

kaitannya dengan pemerintah daerah, pemerintah Indonesia merupakan pemerintah pusat.

Menurut Syafiie (2002) bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan kepengurusan (*eksekutif*), kepengurusan (*legislatif*), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dalam pasal 1 ayat 2, yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melihat definisi Pemerintah Daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang di maksud Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanian adalah:

1. Peraturanpemasukan atau pengeluaran benih/bibit dan penetapan pedoman untuk penentuan standar pembibitan/perbenihan pertanian.
2. Peraturan dan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida dan bahan kimia pertanian lainnya.

3. Penetapan standar pelepasan dan penarikan varietas komoditas pertanian.
4. Penetapan pedoman untuk penentuan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu.
5. Penetapan norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan.
6. Penetapan standar dan produser pengujian mutu bahan pangan nabati dan hewani.
7. Penetapan norma standar teknis pemberantasan hama pertanian.
8. Pengaturan dan penetapan norma dan standar teknis pelayanan kesehatan hewan.

D. Konsep Pemberdayaan.

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*). Ketika berdaya atau memiliki kelemahan dalam aspek pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, *networking*, semangat, kerja keras, ketekunan, dan aspek lainnya.

Pemberdayaan dilakukan dengan penerapan-penerapan yang sesuai dengan potensi yang telah ada di komunitas masyarakat setempat. Di antaranya dengan serangkaian prinsip, teknik, dan praktik yang mampu mengembangkan potensi menjadi kekuatan (disiplin). Pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat lapis bawah dengan mengidentifikasi kebutuhan, mendapatkan sumber daya alam

dalam memenuhi kebutuhan, serta memberdayakan mereka secara bersama-sama. Dengan gerakan ini, masyarakat lapis bawah bisa memiliki kendali secara kuat terhadap kehidupannya sendiri. Orang-orang ikut serta dalam kegiatan pengembangan masyarakat sepanjang waktu. Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membangun sebuah struktur masyarakat yang di dalamnya memfasilitasi tumbuhnya partisipasi secara demokratis ketika terjadi pengambilan keputusan.

Menurut Korten (1980:1984). Pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat. Individu melainkan berperan sebagai pelaku, yang menentukan tujuan mengontrol sumberdaya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya sendiri.

Menurut Anwas (2013:48) Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok/organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau keinginan orang lain. Dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya. pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Menurut Anwas, (2013:49) pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk

mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.

Secara lebih rinci Anwas, (2013:49), menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu di sini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif. Sedangkan indikator pemberdayaan menurut Anwas, (2013:50) paling tidak memiliki empat hal, yaitu: merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, serta di lakukan melalui program peningkatan kapasitas.

Pengertian Pemberdayaan (*Empowerment*) pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.

Pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis adalah suatu proses untuk menolong individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain.
2. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis adalah suatu upaya untuk bergabung dan memengaruhi kalangan elite seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dan lain-lain.
3. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis adalah suatu agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuan pemberdayaan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktural umumnya masyarakat menjadi tidak berdaya lantaran adanya sebuah struktur sosial yang mendominasi.
4. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif post-strukturalis adalah suatu proses yang menantang dan mengubah.

Fokus pemberdayaan dapat bersifat individu dan juga komunitas. Pemberdayaan yang bersifat individu merupakan proses untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi keterampilan, pengalaman individu sehingga memiliki daya saing untuk dapat mencapai kemandirian. Keberdayaan individu berarti seseorang yang bisa memimpin atau mengatur dirinya berperan aktif dalam pembangunan, memiliki kemampuan dan daya saing sesuai dengan potensi dan keinginan yang di miliknya. Pemberdayaan yang bersifat komunitas berarti proses meningkatkan kemampuan dari suatu komunitas tertentu untuk dapat mengatur komunitasnya secara mandiri.

E. Konsep Peran Pemberdayaan

Dalam bagian sebelumnya telah diuraikan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga ia dapat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak hanya menekan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya. melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang berbasis kepada kebutuhan dan potensi masyarakat. Untuk meraih keberhasilan itu.

Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu di dukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif .pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi. Sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memebrikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. peran pemberdayaan merupakan salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain, perbaikan lingkungan dan pengembangan usaha ekonomi, pengembangan lembaga keuangan serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.

Kondisi inilah yang menjadi acuan agen pemberdayaan untuk menentukan perencanaan pemberdayaan (tujuan, materi, metode, alat, evaluasi) yang di rumuskan bersama-sama dengan klien/sasaran. Keterlibatan sasaran dalam tahapan perencanaan ini, merupakan salah satu cara untuk mengajak mereka aktif terlibat dalam proses pemberdayaan. Dengan keterlibatan tersebut, mereka memiliki ikatan emosional untuk mensukseskan program pemberdayaan.

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto (2005:87), penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemungkinan adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat
2. Penguatan adalah memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan adalah melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan adalah memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5. Pemeliharaan adalah memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.
6. Pemungkinan adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat
7. Penguatan adalah memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
8. Perlindungan adalah melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
9. Penyokongan adalah memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan

harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

10. Pemeliharaan adalah memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

F. Konsep Penyuluhan

Secara umum penyuluhan dapat diartikan sebagai proses untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang “suatu yang belum diketahui dengan jelas” untuk dilaksanakan atau diterapkan dalam rangka peningkatan produksi dan pendapatan atau keuntungan yang ingin di capai melalui proses pembangunan.

Dalam proses penyuluhan ada tiga filsafat pokok yang harus dipegang yaitu:

1. Penyuluhan merupakan proses pendidikan
2. Penyuluhan merupakan proses demokrasi
3. Penyuluhan merupakan proses terus-menerus

Dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pada dasarnya kelakuan atau perilaku dipengaruhi oleh pengetahuan kecakapan keterampilan dan sikap mentalnya. Dengan adanya penyuluhan, maka pengetahuan, kecakapan, keterampilan dan sikap mental masyarakat akan mengalami perubahan, yang berarti perilaku dan bentuk kegiatannya akan berubah.

G. Konsep Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha yang sengaja secara sadar dan terencana untuk membantu meningkatkan perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai masyarakat dengan memilih isi (materi, strategi kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai). Pendidikan bukan hanya menyampaikan keterampilan yang sudah dikenal tetapi harus dapat meramalkan berbagai jenis keterampilan dan kemahiran yang akan datang dan sekaligus menemukan cara yang tepat dan cepat supaya dapat dikuasai oleh masyarakat. Menurut Sardiman (1996:57) pendidikan ialah suatu usaha yang sengaja diadakan, baik langsung maupun secara tidak langsung, untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaan.

H. Konsep Pendampingan

Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan untuk pemerintah dan lembaga dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari pemecahan masalah yang dihadapi. Menurut Suharto (2005: 93), menguraikan bahwa pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Berkaitan dengan itu pendampingan berarti bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan. Pendampingan

diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan agar masyarakat dapat hidup secara mandiri.

\

I. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Untuk melaksanakan strategi pemberdayaan maka pemerintah berperan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Pendidikan dan pelatihan
 - a. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan kewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
 - b. Pengembangan program pelatihan.
 - c. Memberikan bantuan kepada petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian.
 - d. Pengembangan pelatihan di bidang pertanian.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan kewajiban dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.

2. Penyuluhan dan pendampingan

Penyuluhan dan pendampingan dilakukan agar para petani dapat melakukan tatacara budidaya, pengelolaan dan pemasaran yang baik.

3. Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian

Dalam pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian yaitu, dapat mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, senantiasa memperhatikan ketertiban umum, mewujudkan kesejahteraan para petani, kemudian mewujudkan pasilitas pendukung hasil pemasaran, yang dimiliki oleh para petani.

4. Luas lahan pertanian.

Lahan pertanian merupakan penetapan kembali penggunaan dan pemantapan lahan sesuai dengan potensi dan tata ruang untuk kepentingan lahan pertanian.

5. Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan untuk akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai hasil pemasaran yang lebih baik. Kemudahan akses yang dimaksud penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyediaan informasi, sarana produksi pertanian, peluang dan tantangan pasar, perkiraan iklim dan cuaca, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan atau wabah penyakit, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

J. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan berbagai macam pendekatan Menurut Suharto (2005:53), Penerapan pendekatan pemberdayaan dapat di lakukan melalui 5 pendekatan yaitu:

1. Pemukiman: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu

membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan strukturak yang menghambat.

2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang di miliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
3. Perlindungan: masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, manghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

K. Tahap-Tahap Pemberdayaan

Menurut Somodiningrat (2004:42). Pemberdayaan tidak bersipat selamanya, melainkan sampai target masyarakat maupun untuk mandiri, dan kemudian di lepas untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu proses belajar, hingga mencapai statusmandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap di lakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian.

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membangun sebuah struktur masyarakat yang di dalamnya memfasilitasi tumbuhnya partisipasi secara demokratis. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan

L. Pertanian Lada Putih

Menurut Ramli (2014), lada merupakan tumbuhan penghasil biji yang merupakan rempah-rempah atau bumbu masakan yang pedas rasanya. Biasanya, lada mengacu kepada merica (*piper nigrum*). Namun dalam beberapa bahasa atau lada (lado) berarti cabai.

Menurut sejarah (Sarpian, 2000:1) tanaman lada termasuk tanaman yang banyak di Indonesia berasal dari daerah ghat barat, india. Usaha mengembangkan lada di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak abad XVI dengan skala kecil-kecilan yang pusat lokasinya di pulau Jawa. Seiring dengan bertambahnya waktu,

lambat laun tanaman rempah-rempah ini terus dikembangkan. setelah memasuki abad XVIII, tanaman lada sudah mulai diusahakan secara besar-besaran yang pusat perkebunannya bukan di pulau Jawa, tetapi di Sumatera dan Kalimantan. sekarang tanaman lada sudah menyebar di seluruh wilayah Indonesia.

Lada atau merica merupakan (*Piper Nigrum L*) adalah rempah-rempah berwujud bijian yang dihasilkan oleh tumbuhan dengan nama sama. Lada sangat penting dalam komponen masakan dunia dan dikenal luas sebagai komoditi perdagangan penting di dunia lama.

Menurut Alred (2011), Merica juga di manfaatkan sebagai scrub untuk memperlhalus kulit. Rasa hangatnya bisa merangsang sirkulasi darah sehingga memberikan lebih banyak oksigen dan nutrisi pada permukaan kulit. Teksturnya yang agak kasar juga bisa mengangkat sel-sel kulit mati. Lada (*Piper nigrum* Linn atau peper) yang oleh ibu rumah tangga sering disebut merica merupakan salah satu komoditas unggulan bagi Indonesia. Secara ekonomi lada merupakan sumber pendapatan petani dan devisa Negara. Secara social merupakan komoditas tradisional yang telah dibudidayakan sejak lama dan aktivitas usahanya menjadi penyedia lapangan kerja yang cukup luas terutama di daerah sentra produksi. Manfaat lada dalam rumah tangga sebagai bumbu penyedap rasa yang mengandung senyawa alkaloid piperin. Betasa pedas, sedang manfaat untuk kesehatan .

Menurut Ujang (2011), lada di bedakan menjadi dua jenis yaitu lada putih dan lada hitam . lada putih adalah buah lada yang dipetik saat buah lada itu sudah matang. Lantas dikupas kulitnya dengan cara merendamnya dalam air mengalir

selama dua minggu, kemudian dijemur selama tiga hari. Sedangkan lada hitam ialah buah lada yang saat dipetik sudah matang tapi kulitnya masih hijau, dan langsung dijemur selama tiga hari tanpa direndam terlebih dahulu. Menurut Ramli (2014), Lada atau merica adalah salah satu tanaman yang berkembang biak dengan biji, namun banyak para petani lebih memilih melakukan penyetekan untuk mengembangkannya, bentuk batang pada tanaman lada adalah beruas-ruas seperti tanaman tebu dan panjang ruas bukannya berkisar 4-7 cm, hal ini tergantung pada tingkat kesuburan, panjang ruas buku pada pangkal biasanya lebih pendek dibandingkan dengan ruas berada di pertengahan maupun ujung, sedang ukuran diameternya rata-rata berukuran 6-25 mm. akar pada tanaman lada adalah akar tunggang namun mirip dengan akar serabut, ukurannya kecil-kecil dan tidak panjang sebagaimana pada akar tunggang biasanya, sesuai dengan jenisnya akar tanaman ini dibedakan menjadi dua, yakni akar lekat dan akar tanah, akar lekat adalah akar yang tumbuh pada setiap ruas buku yang berada di permukaan tanah dan mempunyai panjang rata-rata 2,5-3,5 cm.

1. Perbedaan lada putih dan lada hitam

Menurut Ramli (2014), Lada hitam dan lada putih sebenarnya tumbuh dari tanaman yang sama. Namun, keduanya memiliki cara pengolahan yang berbeda sehingga menghasilkan warna, tekstur, dan rasa berbeda yang memiliki khas masing-masing.

Lada hitam diambil dari buah lada yang hampir busuk dan mengering karena sinar matahari sehingga memiliki bagian kulit yang kehitaman. Sebaliknya, lada putih di ambil dari buah lada yang matang. Proses selanjutnya yang dilakukan

adalah merendam lada dengan air garam agar kulitnya terkelupas dan meninggalkan hanya bagian dalamnya saja. Lada putih memiliki rasa yang lebih pedas daripada lada hitam. Namun rasa lada putih tidak sekaya rasa lada hitam yang memiliki rasa lebih kompleks. Lada hitam memiliki aroma yang khas dan berbeda.

Lada putih memiliki rasa yang lebih pedas dari pada lada hitam. Namun rasa lada putih tidak sekaya rasa lada hitam yang memiliki rasa lebih kompleks. Lada hitam memiliki aroma yang khas dan berbeda.

Menurut Sarpian (2000:2) bagian tanaman lada yang dimanfaatkan adalah buahnya. Buah lada yang sudah diolah berbentuk lada putih dan hitam termasuk bahan perdagangan yang serba guna (multi function). Misalnya, lada putih dapat dimanfaatkan sebagai bumbu dalam berbagai masakan. Lada sebagai bumbu masakan bisa memberikan aroma yang sedap dan dapat menambah kelezatan makanan. Di samping itu lada juga digunakan sebagai campuran bahan obat-obatan. Produk lada hitam pada umumnya dimanfaatkan untuk minyak wangi (parfum).

2. Tujuan Pemberdayaan Petani Lada Putih

Untuk mencapai tujuan tersebut ada tiga cara yang dapat di tempuh (Sarpian, 2000:6) yaitu:

- a. Tanaman lada diusahakan agar dapat berbuah lebih cepat dari waktu yang seharusnya.
- b. Tanaman lada di usahakan agar dapat berbuah lebih banyak dari yang seharusnya.

- c. Begitu juga tanaman lada bisa hidup lebih lama maka kita tidak perlu membuka lahan perkebunan setiap tahun.

3. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai jembatan bagi konsep-konsep pembangunan makro dan mikro. Dalam kerangka pemikiran itu berbagai input seperti dana, prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai rangsangan untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian, proses transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut; pertama, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Kedua, Program ini harus langsung mengikut sertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan

kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

M. Kerangka Pikir

Peran pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat diperlukan para petani untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena pembangunan pertanian sangat berpengaruh terhadap sumber daya manusia yang berada didalamnya. Apabila sumber daya manusia memiliki motivasi tinggi, kreativitas dan mampu mengembangkan inovasi, maka pembangunan pertanian dapat dipastikan semakin baik. Oleh karena itu perlu diupayakan pemberdayaan petani lada putih untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Artinya suatu peningkatan kemampuan yang sesungguhnya potensinya ada. Dimulai dari status kurang berdaya menjadi lebih berdaya, sehingga lebih bertanggung jawab.

Pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman lada secara umum mengalami pembentukan akar, batang, dahan, ranting, dan daun. Apabila pertumbuhan vegetatifnya sudah maksimal, tanaman memasuki fase reproduktif. Dalam fase reproduktif ini, kegiatan tanaman lebih mengacu kepada penimbunan sebagian besar karbohidrat untuk pertumbuhan bunga dan buah.

Pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran serta pemerintah daerah yang sekaligus merupakan pelaku pembangunan pertanian. Dengan peran yang sangat penting pemutar roda perekonomian Negara Indonesia, khususnya di Kabupaten Luwu Timur, maka perlu pemberdayaan masyarakat sehingga petani mempunyai power yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Peran pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan kepada para petani sehingga meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah penyuluhan atau pendampingan, memberikan bantuan baik berupa dana dan lain-lain dan pengadaan sarana dan prasarana pertanian. Pemerintah dalam menjalankan proses pemberdayaan kepada masyarakat pertanian tentunya pemerintah daerah dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

Bersaing dengan Sektor pertanian, pemeliharaan petani lada putih membutuhkan faktor pendukung yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, sehingga lada putih dapat di kembangkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani. Realita peran pemberdayaan pertanian lada putih masih ditemukan permasalahan atau faktor penghambat yaitu minimnya pengetahuan dan sumber daya manusia, maka dari itu peran pemerintah di harapkan memberdayakan masyarakat petani untuk meningkatkan taraf hidup petani lada putih dan di harapkan kepada pemerintah Kabupaten Luwu Timur berupaya seoptimal mungkin untuk memajukan sektor skala kecil ini.

Untuk memudahkan pemahaman dari penjelasan diatas maka penulis merumuskan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut:



N. Fokus Penelitian

Peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani lada putih di desa balambano kecamatan wasuponda kabupaten luwu timur yaitu bentuk atau model yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani lada putih.



O. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah
2. Peran Pemerintah daerah sangat penting dalam menciptakan perubahan di dalam masyarakat, pemerintah yang lebih maju.
3. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki.
4. Pendidikan dan pelatihan yaitu meningkatkan pengetahuan pola pikir masyarakat.
5. Penyuluhan dan pendampingan yaitu agar petani dapat melakukan tata cara pemeliharaan, pengelolaan, dan pemasaran yang baik, kemudian menganalisis kelayakan usaha dan kemitraan dengan pelaku pertanian.
6. Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil petani dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
7. Kesejahteraan pertanian merupakan keberhasilan seorang petani dalam mengembangkan hasil usahanya, baik di bidang tanaman pangan, dan perkebunan.
8. Faktor pendukung pendidikan dan pelatihan, kelembagaan, dan sarana produksi.
9. Faktor penghambat yaitu minimnya pengetahuan dan sumber daya manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan Penelitian dilakukan selama 2 bulan. Penelitian ini berlokasi Di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini juga dilaksanakan di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena salah satu mata pencaharian masyarakat Desa Wasuponda adalah dibidang Pertanian itulah alasannya kenapa peneliti mengambil lokasi di Desa Balambano.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian adalah jenis penelitian kualitatif dengan cara menjelaskan secara tepat fakta-fakta tentang peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani lada putih dan faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat petani lada putih yang bersipat khusus, kemudian di teliti dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum dan tipe penelitian adalah survei yaitu turun langsung ke lokasi penelitian.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologis dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat. Dasar penelitian ini adalah wawancara, yaitu melakukan dialog

(wawancara) kepada informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan, Kepala dan pengawai Dinas Pertanian Kabupaten Balambano serta masyarakat petani lada putih.
2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen yang mendukung dan berhubungan dengan pokok-pokok pembahasan penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informannya. *Purposive sampling* merupakan penentuan informan tidak berdasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan peneliti. Yang menjadi informan peneliti adalah

- | | |
|--|-----------|
| a. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur | = 1 Orang |
| b. Staf Bidang Pertanian Kabupaten Luwu Timur | = 1 orang |
| c. Kecamatan/ Sekertaris Camat | = 1 orang |
| d. Kelurahan/ Sekerteris Lurah | = 1 orang |
| e. Kalangan masyarakat | = 3 orang |

Jadi Jumlah Seluruh Informan

= 7 orang Informan

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

1. Metode Wawancara dengan melakukan komunikasi secara langsung untuk mendapatkan informasi secara mendalam dengan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan pada informan dengan melakukan interview yang telah di rumuskan peneliti.
2. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis tentang gejala-gejala yang diamati. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung (*direct observation*). Dan sebagai peneliti yang menempatkan diri, sebagai pengamat (*recognized outside*) sehingga interaksi peneliti dengan subjek penelitian bersifat terbatas.
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan data-data dan laporan tertulis yang tersimpan sebagai arsip yang berkaitan dengan penelitian ini dengan kenyataan yang terjadi.

F. Teknik Analisa Data

Peneliti menggunakan deskripsi kualitatif sebagai metode analisis data. Adapun yang dimaksud dengan metode deskripsi adalah suatu cara mengembangkan data tersebut dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Sedangkan pola pikir secara kualitatif artinya hanya mengecek dan melaporkan apa yang ada ditempat diselenggarakannya penelitian.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebagai proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data.

2. Sajian Data

Sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun berupa informasi yang sistematis. Melalui sajian data memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada reduksi data dan sajian data.

G. Pengabsahan Data

Teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik seperti itu juga menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.

2. Triangulasi metode

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan atau ketidak akuratannya. Penelitian ini dilakukan secara interview yaitu

dengan cara melakukan suatu penelitian secara langsung dan dapat wawancara langsung pada sumber penelitian.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN\

A. Karakteristik Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran kabupaten luwu utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 februari 2003. Malili adalah ibu kota dari Kabupaten Luwu Timur yang terletak di ujung utara teluk bone. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km². Kabupaten ini terdiri atas 11 kecamatan yakni kecamatan Malili, kecamatan Angkona, Tomoni, Tomoni Timur, Kalena, Towuti, Nuha, Wasuponda, Wotu, Burau dan Mangkutana.

Secara geografis wilayah Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi selatan. wilayah Kabupaten Luwu Timur terletak dibagian timur Provinsi Sulawesi Selatan, dengan potensi sumber daya alam yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Kabupaten Luwu Timur secara astronomis terletak 119°28'56" sampai 121°47'27" bujur timur dan 2°03'00" sampai 3°03'25" Lintang selatan. adapun batas-batas wilayah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten luwu utara;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sulawesi Tenggara.

Di Kabupaten Luwu Timur terdapat 14 sungai. Sungai terpanjang adalah sungai kalena dengan panjang 85 km. Sungai tersebut melintasi di kecamatan mangkutana. Sedangkan sungai terpendek adalah sungai Bambalu dengan panjang 15 km. Selain itu, di Kabupaten Luwu Timur juga terdapat 5 danau. Kelima danau tersebut antara lain danau matano (dengan luas 245.70 km²), danau mahalona (25 km²), dan danau towuti (585 km²) dan danau tarapang masapi (2.43 km²) dan danau lontoa (1.71 km²). danau matano terletak di kecamatan nuha sedangkan keempat kecamatan lainnya terletak di kecamatan towuti. Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi selama tahun 2011, tercatat rata-rata curah hujan mencapai 258 mm, dengan rata-rata jumlah hari hujan per bulan mencapai 17 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan desember, yakni 393 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 23 hari.

Untuk lebih jelasnya, wilayah administrasi Kabupaten luwu timur, dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Gambar Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur



Sumber: Profil Kabupaten Luwu timur

2. Profil Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Luwu Timur

- a. Letak kantor dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Luwu Timur

Kantor dinas pertanian, perkebunan dan peternakan Kabupaten Luwu Timur berlokasi di Kabupaten Luwu Timur tepatnya di Jl. Poros Malili.

- b. Jumlah Pegawai dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Luwu Timur

Jumlah pegawai dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Luwu Timur sebanyak 55 orang. Kualifikasi pendidikan dinas pertanian, perkebunan dan peternakan Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.1
Latar Belakang Pendidikan Pegawai

No	Tingkat pendidikan	Jumlah pegawai
1	Sarjana strata dua (S2)	3 Orang
2	Sarjana strata satu (S1)	46 Orang
3	Sarjana diploma empat (D4)	2 Orang
4	Sarjana diploma tiga (D3)	2 Orang
5	SLTA atau sederajat	1 Orang
6	SLTP atau sederajat	1 Orang
	Total pegawai	55 Orang

Sumber: Dinas pertanian, perkebunan dan peternakan Kab. Luwu Timur 2015

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pada dinas pertanian, perkebunan dan peternakan Kabupaten Luwu Timur memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 46 orang, D4 sebanyak 2 orang, D3 sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 1 orang dan SLTP sebanyak 1 orang.

Tabel. 2
Pangkat dan Golongan

No	Pangkat / Golongan	Jumlah pegawai
1	Pembina Tk.I/IV.b	2 Orang
2	Pembina / IV. A	1 Orang
3	Penata Tk.VIII.d	5 Orang
4	Penata /III.c	16 Orang
5	Penata Muda Tk.VIII.b	17 Orang
6	Penata Muda /III.a	9 Orang
7	Pengatur Tk.I/II.d	1 Orang
8	Pengatur Muda Tk.I/II.b	3 Orang
9	Golongan 1	1 Orang
	Total pegawai	55 orang

Sumber: Dinas pertanian, perkebunan dan peternakan Kab. Luwu Timur

Berdasarkan tabel pangkat/golongan diatas menunjukkan jumlah pegawai dinas pertanian, perkebunan dan peternakan Kabupaten Luwu Timur adalah 55 orang dengan rincian kepala dinas 1 orang, sekretaris 1 orang, kepala bidang 4 Orang, Kasubag 3 orang, kepala seksi 12 orang, Staf bagian 34 orang.

c. Visi dan misi

Dinas pertanian, perkebunan dan peternakan Kabupaten Luwu Timur merupakan instansi dalam lingkup pemerintah daerah yang efisien dan

efektif, hendaknya berdasar atas sejumlah dokumen perencanaan yang sinergis dan konsisten.

Adapun Visi Dinas pertanian, perkebunan dan peternakan Kabupaten Luwu Timur adalah **“Keberlanjutan Pembangunan Pertanian Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar Petani Menuju Agro-Industri”**.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka telah dirumuskan Misi dinas pertanian, perkebunan dan peternakan Kabupaten Luwu Timur adalah :

- 1) Mengoptimalkan penggunaan lahan dan air
- 2) Meningkatkan pengembangan prasarana dan sarana produksi pertanian melalui penguasaan teknologi
- 3) Meningkatkan produksi dan produktifitas pada komoditi unggulan (padi, jagung, kedelai, kakao, kelapa sawit, lada, ternak besar dan ternak kecil).
- 4) Meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perkebunan dan peternakan.
- 5) Menumbuhkan usaha permodalan bagi petani dan pelaku usaha lainnya.

d. Struktur organisasi

Struktur Organisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas sebagai pimpinan pada dinas pertanian, perkebunan dan peternakan kabupaten luwu timur.
- 2) Sekretariat mempunyai tugas dan kewajiban kepala dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi, merencanakan, memantau,

mengendalikan dan mengevaluasi aset, program/ kegiatan dan pengembangan di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan serta pembinaan organisasi.

- a) Sub bagian perencanaan
 - b) Sub bagian keuangan
 - c) Sub bagian umum dan kepegawaian
- 3) Bidang tanaman pangan dan hortikultura
- a) Seksi tanaman pangan
 - b) Seksi hortikultura
 - c) Seksi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura
- 4) Bidang perkebunan
- a) Seksi teknik produksi dan usaha tani
 - b) Seksi pengembangan perkebunan
 - c) Seksi perlindungan tanaman perkebunan
- 5) Bidang peternakan
- a) Seksi produksi, penyebarandan perkembangan ternak
 - b) Seksi usaha peternakan dan pengolahan hasil
 - c) Seksi pengendalian penyakit hewan
- 6) Bidang sarana dan prasarana pertanian
- a) Seksi pengolahan lahan dan air
 - b) Seksi pupuk dan pestisida
 - c) Seksi alat dan mesin



- 7) Unit pelaksanaan teknis dinas
- 8) Kelompok jabatan fungsioanal

Struktur organisasi dinas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan

e. Tujuan

Tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi ialah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya pertanian secara optimal dan berkelanjutan
- 2) Meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap petanidalam mengelola usaha tani secara profesional
- 3) Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi hasil pertanian
- 4) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan produk pertanian,perkebunan dan peternakan
- 5) Mendorong perkembangan usaha pertanian secara mandiri

f. Kebijakan

Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran penetapan kebijakan..

- 1) Melakukan perluasan areal pertanian. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan air
- 2) Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparaturdan petani dalam penerapan teknologi tepat guna

- 3) Mendukung kemudahan petani dalam memperoleh saran dan prasarana produksi pertanian
- 4) Melakukan upaya yang komprehensif dan holistik dalam pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit
- 5) Membimbing petani dalam pengelolaan paska panen serta memfasilitasi petani dalam usaha permodalan.

3. Profil Kecamatan Wasuponda

Kecamatan wasuponda merupakan kecamatan ketiga dengan luas terbesar di kabupaten luwu timur, dengan luas wilayah 1.244 km² atau sekitar 17,91 persen dari luas wilayah luwu timur. Kecamatan wasuponda berada pada 120°52'30' sampai 121° 24' 00' bujur timur dan 2°18' 00" sampai 2°49' 30" lintang selatan. Yang berbatasan langsung dengan

- a) Sebelah Utara : Propinsi Sulawesi Tengah
- b) Sebelah Timur : Kecamatan Nuha dan Kecamatan Towuti.
- c) Sebelah Selatan : Kecamatan Malili dan Angkona.
- d) Sebelah Barat : Kecamatan Mangkutana dan Angkona.

Kecamatan wasuponda terdiri dari 6 Desa/kelurahan yang seluruhnya berstatus desa definitif. Wilayah kecamatan wasuponda adalah daerah yang seluruh desanya merupakan wilayah bukan pantai. Secara topografis wilayah wasuponda merupakan daerah berbukit-bukit.

Selama tahun 2012 tercatat rata-rata curah hujan mencapai 253 mm dengan jumlah hari hujan perbulan mencapai 18 hari. Curah hujan yang tertinggi pada bulan februari yakni 468 mmdengan jumlah hari hujan sebanyak 23 hari. Terdapat 4 sungai besar yang mengalir kecamatan ini yang terpanjang adalah sungai Larona.

Kepadatan penduduk di kecamatan wasuponda tergolong rendah yaitu sekitar 16 orang per kilometer persegi, jauh berada di rata-rata Kabupaten Luwu Timuryang berkisar 39 orang per kilometer persegi. Desa yang terpadat penududuknya adalah desa wasuponda dengan kepadatan 32 orang per kilometer persegi, sedang paling rendah adalah desa kawata dengan kepadatan sekitar 9 orang perkilometer persegi. Pada tahun 2012 jumlah penduduk rata-rata penduduk dalam satu rumah tangga sebanyak 5 orang. Pada tahun yang sama jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan. Laki-laki sebanyak 10.817 orang dan perempuan sebanyak 9.464 orang, sehingga rasio jenis kelaminnya sebesar 114,30 yang artinya dari 100 wanita terdapat sekitar 114 laki-laki. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2011-2012 sebesar 2,18 persen per tahun. selanjutnya penduduk menurut kelompok umur sekolah SD (7-12 tahun) sebanyak 2.896 orang, penduduk usia sekolah SLTP (13-15 tahun) sekitar 1.108 orang dan penduduk usia sekolah SLTA (16-18) sekitar 936 orang.

Penduduk kecamatan wasuponda umumnya berprofesi sebagai petani, sedangkan non pertanian terutama bergerak pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup besar hal ini terlihat dari kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB).

a) Visi

Dengan tetap megacu pada visi Kabupaten Luwu Timuryaitu keberlanjutan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Luwu Timur menuju kabupaten Agroindustri Tahun 2015 maka disusun visi kecamatan wasuponda yaitu “mewujudkan kecamatan wasuponda yang Religius, Maju, Mandiri, Dalam Mendukung Agroindustri 2015”

b) Misi

Untuk mencapai visi tersebut, maka ada beberapa misi yang harus dicapai sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pembinaan antar dan inter umat beragama;
- 2) Mendorong intervensi multisektoral dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Mendorong terciptanya kemandirian masyarakat dalam menggali semua potensi yang ada;
- 4) Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam menyelenggarakan organisasi dan kegiatan di kecamatan;
- 5) Mendorong peran aktif masyarakat dalam budaya gotong royong dan swadaya masyarakat.

Untuk menerapkan visi dan misi tersebut maka nilai-nilai profesionalisme harus diutamakan, nilai-nilai profesionalisme yang dimaksud yaitu proaktif, kreatif

dan inovatif yang senantiasa melakukan pembaharuan atau perubahan kearah yang lebih baik.

Tugas pokok dan fungsi kecamatan wasuponda berdasarkan peraturan bupati luwu timur Nomor 48 tahun 2008 diuraikan sebagai berikut:

1. Camat

- 
- a) Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat desa/kelurahan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
 - b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum;
 - d) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
 - e) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
 - f) Membina dan mengarahkan sekretaris kecamatan, para kepala sub bagian dan kepala saksi dalam melaksanakan tugasnya;
 - g) Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan peralatan (aset) dan keuangan kecamatan;
 - h) Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas pegawai dalam lingkup kecamatan;

- i) Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- j) Menilai prestasi kerja sekretaris kecamatan, para kepala sub bagian dan kepala seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- l) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab.

2. Sekretaris Camat

- a) Penyusunan rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- b) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d) Penilaian hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- e) Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naska dinas untuk penyempurnaan dan menghindari kesalahan;
- f) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g) Pelaksanaan dan pengelolaan manajemen kesekretarian kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) Pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;

- i) Pemberian pelayanan teknis administratif kepada camat dan seksi-seksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j) Menginvestasikan, mengelola dan mengevaluasi data baik pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta informasi untuk pembinaan dan penyelenggaraan tugas umum kecamatan;
 - k) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris camat serta memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan kebijakan;
 - l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Kepala seksi tata pemerintahan
- a) Menyusun rencana program dan kegiatan seksi pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) Penyelenggarakan fasilitas pemilihan kepala desa dan badan perwakilan desa;
 - c) Penyelenggarakan lomba atau penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
 - d) Penyelenggarakan fasilitas kerjasama antar desa/kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan;
 - e) Memfasilitasi penataan desa/kelurahan dan penyusunan peraturan desa;
 - f) Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan, inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- 

- g) Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
 - h) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - i) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan;
 - j) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh camat;
 - k) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris camat.
4. Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa
- a) Menyusun rencana program dan kegiatan seksi pembangunan masyarakat desa/kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) Melaksanakan fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan di wilayah kerjanya.
 - c) Melaksanakan dan memfasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
 - d) Mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
 - e) Menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat;
 - f) Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- 

- g) Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
 - h) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - i) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
 - j) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh camat;
 - k) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris camat.
5. Sub bagian umum dan kepegawaian
- a) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;
 - c) Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian;
 - d) Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan dan aset;
 - e) Mengelola dan melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan;
 - f) Mengelola dan melaksanakan urusan ketalaksanaan;
 - g) Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya;
 - h) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;

- i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh camat;
 - j) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada camat.
6. Sub bagian perundang-undangan
- a) Menyiapkan pedoman dan petunjuk di bidang penelitian pengolahan data hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pemerintah daerah;
 - b) Pemantauan perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah daerah;
 - c) Penginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan;
 - d) Mengajukan usul daftar rancangan produk hukum daerah kepada bupati;
 - e) Menyiapkan bahan untuk pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah;
 - f) Melaksanakan evaluasi dan merumuskan laporan kegiatan sub bagian perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan;
 - g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Lada Putih

Salah satu karakteristik dalam pembangunan ekonomi adalah pergeseran jangka panjang populasi dan produksi dari sektor pertanian menjadi sektor industrialisasi dan sektor jasa. konsep peran pembangunan pada sektor pertanian merupakan batu loncatan

menuju pembangunan pada sektor industri. keberhasilan pembangunan industri merupakan lanjutan keberhasilan di sektor pertanian. Pertanian memiliki peranan penting dalam proses pembangunan dimana pembangunan sangat diperlukan dalam upaya menurunkan kemiskinan.

Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur memberikan arahan kepada staf bidang pertanian, mengkoordinasi Pelaksana Penyuluh Lapangan (PPL) masing-masing setiap Desa berdasarkan fungsi dan tugasnya setiap desa pada saat melakukan pelaksanaan pelatihan terhadap masyarakat petani khususnya petani lada putih kapan dan dimana saja melalui Sekolah Lapangan dalam penerapan Pengelolaan Tanah Terpadu (SL-PTT) dan menerapkan paket Teknologi produksi lada putih. Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu aparat Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timor yang bernama “Dra. Rosdiati, M.Said” menyatakan bahwa:

“Menurut saya pemerintah memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya, oleh karena itu peran pemerintah daerah dalam hal ini dinas pertanian Kabupaten Luwu Timur dalam pemberdayaan petani lada putih melalui bentuk penyuluhan dan pelatihan serta memfasilitasi petani untuk mencapai produktifitas yang efektif. Dari tiga pemberdayaan ini walaupun belum terlalu menyeluruh ke setiap desa tapi kami dari aparat pemerintah selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik (pemberdayaan) kepada masyarakat khususnya kepada petani lada putih” (28 Desember 2015).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Pemberdayaan masyarakat petani lada putih para aparat pemerintah dari dinas pertanian memberikan suatu bentuk penyuluhan dan pelatihan, fasilitas pengembangan produksi lada putih. serta arahan-arahan kepada staf bidang pertanian di setiap Kecamatan.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu staf bidang pertanian Kabupaten Luwu Timur yang bernama “Saenab,Sp” terkait peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani lada putih. Seperti yang dituturkan pada saat wawancara sebagai berikut :

“Saya selaku staf bidang Pertanian Kabupaten Luwu Timur memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada para petani seperti arahan-arahan bercocok tanam dan cara memilih bibit yang bagus hingga hasil produksi sesuai keinginan masyarakat melalui Pelaksana Penyuluh Pertanian (PPL). (Informan 30 Desember 2015).

Dari kedua hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat petani lada putih yang diberikan aparat pemerintah daerah itu sudah dilakukan dan sangat berarti bagi masyarakat dalam meningkatkan hasil produksi dan keterampilan para petani dalam mengelolah pertaniannya.dengan melalui penyuluhan dan pelatihan para petani dapat mengerti bagaimana cara-cara pengolahan tanah yang baik, pemilihan bibit unggul, cara penanaman, pemberian pupuk, pengairan yang teratur, pengendali, dan pengolahan pasca panen. Karena pemerintah sangat menentukan kemajuan pertanian di kecamatan wasuponda.

Pelaksanaan tugas dan fungsi seorang pemerintah daerah dalam bidang pemerintahan merupakan salah satu bentuk kegiatan aparat pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan diskripsi mengenai pelaksanaan fungsi tersebut, untuk itu dalam melaksanakan tugasnya pemerintahan daerah mempunyai fungsi:

- a) Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri

- b) Menggerakkan partisipasi masyarakat
- c) Melaksanakan tugas dari pemerintah di atasnya
- d) Keamanan dan ketertiban masyarakat
- e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pemerintah di atasnya.

Untuk menyeleggarakan fungsi tersebut di atas maka seorang pemerintah daerah harus mengusahakan:

- a) Terpenuhinya kebutuhan esensial masyarakat
- b) Tersusunya rencana dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan pembangunan setempat
- c) Terselenggaranya peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi secara lintas sektor
- d) Terselenggaranya program yang berkelanjutan
- e) Adanya peningkatan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat

Selain fungsi pemerintah daerah yang dijelaskan di atas, pemerintah daerah masih mempunyai peranan yang lebih penting terhadap kemajuan dan perkembangan wilayah yang dipimpinnya yaitu melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dalam meningkatkan peran terhadap pengembangan pembangunan khususnya dibidang pertanian. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dideskripsikan tentang peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani lada putih yang secara garis besar mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Pendidikan dan pelatihan

Peran pemerintah memberikan pendidikan dan pelatihan adalah menggerakkan partisipasi multipihak dalam proses pembangunan. Dimana melibatkan 3 pihak yaitu melibatkan pemerintah, swasta, dan warga masyarakat. Sebagai pemerintah berperan memberikan pelaksanaan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan pelatihan, pembimbingan dan pengarahan yang dilakukan pemerintah di Kecamatan wasuponda untuk meningkatkan keterampilan para petani maka dilakukanlah penyuluhan yaitu melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervise di mana pun dan kapan saja.

Peran pemerintah daerah melalui staf bidang pertanian memberikan pelaksanaan pelatihan di Kecamatan wasuponda diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dan partisipasi warga yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah termasuk pembangunan pada sektor pertanian khususnya petani lada putih. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya usaha-usaha pembangunan dibidang pertanian sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat agar lebih sejahtera maka dibutuhkan peran pemerintah secara maksimal, sehingga dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin yang ada di daerah tersebut.

Kecamatan wasuponda dalam pelaksanaan pelatihan memberikan penyuluhan kepada masyarakat yaitu dengan cara mengumpulkan kelompok tani dan masyarakat di tiap Desa. Untuk memberikan pengertian tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang

perlu dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Seperti bagaimana pemeliharaan bibit atau benih unggul yang cocok dengan cuaca, iklim, dan tanah, jarak tanam dan lubang tanam serta bagaimana memelihara lada putih. Apabila masyarakat telah memahami dan mengerti tentang hal tersebut maka pemerintah tinggal menggerakkan dan memberikan bimbingan bagaimana sistem pengelolaan pertanian khususnya lada putih. Selain itu pemerintah Kecamatan wasuponda juga melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga pertanian yang ada tujuan utamanya adalah agar setiap lembaga mampu memberikan penyuluhan kepada para petani dengan relatif mudah dan lancar. Untuk itu diperlukan penerapan prinsip-prinsip efisiensi terhadap fungsi-fungsi manajemen seperti manajemen administrasi, manajemen pelayanan, manajemen produksi dan distribusi, manajemen kontrol, manajemen supervisi, manajemen sumberdaya manusia dan manajemen informasi kelembagaan. Sehingga secara terinci revitalisasi kelembagaan pertanian di Kecamatan wasuponda meliputi:

- a) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia para aparat lembaga-lembaga pertanian sehubungan dengan semakin berkembangnya teknologi, permasalahan dan bahkan kebutuhan para petani. Dimana model pendidikan dan pelatihan ditekankan pada pengembangan bidang produksi dan distribusi, teknologi dan informasi, pemasaran, finansial, kelembagaan, dan infrastruktur.
- b) Diperlukan restrukturisasi kelembagaan penyuluhan pertanian yang diharapkan mampu menyentuh secara langsung kebutuhan-kebutuhan petani dengan melibatkan petani secara lebih aktif lagi. Sehingga diharapkan mampu

menciptakan bentuk penyuluhan yang mandiri dimana petani berperan aktif didalamnya, sehingga perlu terus ditingkatkan peranannya. Untuk itu jumlah dan kualitas aparat yang memberikan penyuluhan harus memiliki kemampuan di bidang konsultasi dan analisis produksi dan pemasaran serta sebagai mediatorke berbagai lembaga keuangan, pendidikan, dan pelatihan perlu terus ditingkatkan.

- c) Meningkatkan kualitas manajemen koperasi, khususnya dalam kualitas sumberdaya manusia para pengurus, guna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup petani. Petani yang bergabung dalam kelompok wiraswasta perlu dilembagakan didalam koperasi terutama guna untuk meningkatkan rebut tawar dalam memperoleh pelayanan kredit dan pemasaran hasil-hasil pertanian.
- d) Meningkatkan peran badan penerapan teknologi dan informasi pertanian. Sehingga penelitian-penelitian dibetbagai aspek pertanian perlu didukung dengan anggaran dan fasilitas yang memadai serta kualitas sumberdaya peneliti yang diharapkan semakin tinggi kwalifikasinya. Dengan demikian teknologi inovatif kepada petani akan meningkat.
- e) Meningkatkan peran serta dari lembaga-lembaga tradisional seperti organisasi lumbung desa dan pengairan. Dalam situasi produktivitas pertanian dan penyediaan pangan yang relatif rendah maka peran kedua organisasi tersebut menjadi sangat penting untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerahnya. Untuk itu diperlukan adanya pendampingan terhadap lembaga tersebut berupa manajemen kelembagaan dari pemerintah daerah setempat.

- f) Meningkatkan kemandirian organisasi petani. Dimana organisasi tersebut dimiliki, digerakkan dan dikendalikan oleh para petani sendiri. Pemerintah daerah lebih berfungsi sebagai fasilitator dan regulator saja. Sehingga diperlukan adanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh para pengelola dan efektivitas manajemen kelembagaan melalui pelatihan secara intensif.

Pemberdayaan masyarakat petani lada putih dalam bidang pertanian memiliki makna meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tercermin peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga peran pemerintah Kecamatan wasuponda memberikan pelaksanaan pelatihan meliputi belajar, uji coba varietas, sekolah lapang, dan pengelolaan tanaman .

Berikut ini hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kepala camat wasuponda yang bernama “Joni Patabi, S.Sos” menyatakan bahwa:

“Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani lada putih yaitu dalam bentuk pendidikan dan pelatihan sejauh ini sudah terlihat dengan adanya kerjasama kepala dinas pertanian melalui staf bidang pertanian untuk membantu masyarakat pertanian dalam memberikan pelatihan dan pendidikan khususnya petani lada putih”(hasil wawancara JPT, 1 januari 2016).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat petani lada putih di Kecamatan wasuponda sejauh ini sudah terlihat karna dengan adanya kerjasama oleh pemerintah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan.

Berikut hasil wawancara dengan kepala desa Bapak Karim. P mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan.

“Menurut saya dengan adanya pendidikan dan pelatihan yang diadakan di desa kita ini sangat bagus agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara penanaman yang baik, memberikan arahan kepada masyarakat yang kurang memahami supaya tau sehingga pertanian kedepannya berjalan dengan baik,khususnya petani lada putih”(hasil wawancara KRM, 2 desember 2016).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat petani lada putih melalui pelaksanaan pelatihan yang diberikan pemerintah sangat berarti bagi masyarakat petani lada putih khususnya dalam meningkatkan keterampilan para petani dalam mengelolah pertaniannya. Dengan melalui pelatihan masyarakat dapat mengetahui cara penanaman yang baik agar pertanian kedepannya berjalan dengan baik terhadap petani lada putih di kecamatan wasuponda.

Berikut hasil wawancara dengan warga masyarakat bernama Nawir di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda:

“Saya selaku warga yang berprofesi sebagai petani lada putih senang dengan adanya bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di desa kami. Saya bersyukur dengan adanya pendidikan dan pelatihan tersebut banyak pengetahuan yang saya pribadi mengetahui, pengetahuan saya juga bertambah. Saya berterima kasih dengan adanya pendidikan dan pelatihan di kecamatan wasuponda. Khususnya masyarakat petani lada putih”(hasil wawancara NWR, 3 januari 2016).

Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk petani sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat di dan bentuk pelatihan yang diberikan dapat berguna bagi petani kedepannya,khususnya petani lada putih.

Berikut hasil wawancara dengan warga masyarakat bernama Ganing di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur:

”Saya selaku warga yang berprofesi sebagai petani lada putih sangat senang dalam pemberdayaan yang di lakukan oleh pemerintah daerah dalam pertanian. Pendidikan yang diberikan kepada kami para petani sangat bermanfaat bagi perkembangan pertanian kedepannya. Maka dari itu saya berterima kasih kepada pemerintah daerah”(hasil wawancara GNG, 3 januari 2016).

Dari hasil wawancara di yang di lakukan oleh penulis dapat di simpulkan bahwa pemberdayaan petani dalam pendidikan dan pelatihan sudah dilakukan oleh pemerintah setempat. Masyarakat setempat pun sangat senang dengan adanya pendidikan yang dilakaukan oleh pemerintah dan petani memanfaatkan pendidikannya agar kedepannya pertanian lada putih dapat berkembang dengan baik.

Berikut hasil wawancara dengan warga masyarakat bernama Syoimuddin H,Ahmad di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur:

“Saya selaku masyarakat balambano yang berprofesi sebagai petani lada putih bersyukur dengan adanya pemberdayaan ini dan bentuk pemberian diklat seperti pemerintah mengajarkan para petani tentang pemeliharaan tanaman lada di desa kami maka dari itu saya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah”(hasil wawancara SMD, 3 januari 2016).

Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk petani sangat disambut gembira oleh masyarakat petani karena petani yakin bahwa dengan adanya pendidikan dan pelatihan dengan mengajarkan para petani bagaimana cara pemeliharaan lada yang baik, pemebrian pupuk yang bagus untuk tanaman lada.

2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Penyuluhan Dan Pendampingan

Peran pemerintah dalam memberikan bentuk penyuluhan dan pendampingan. Untuk menjadi pendamping teknologi maka para penyuluh di tuntutan untuk berbaur dan hidup dengan masyarakat pembudidaya. Karena penyuluh selain sebagai pendamping

teknologi juga berperan penting sebagai pendamping usaha agar penyuluh pendamping bisa terampil memberi contoh kepada pelaku utama maka dalam penyegaran teknologi ini selain diberi materi dalam bentuk teori juga dilengkapi dengan praktek lapangan. Inilah yang menjadi beda dari pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya.

Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kepala camat wasuponda yang bernama “Joni Patabi, S.Sos” menyatakan bahwa:

“Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani lada putih yaitu dalam sejauh ini cukup berjalan lancar dengan melalui kerjasama dengan kepala dinas dengan kepala dinas pertanian dan membantu masyarakat pertanian dalam memberikan pelatihan serta pelaksanaan penyuluhan khususnya pertanian lada putih”(Hasil wawancara JPT, 1 januari 2016).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat petani lada putih di kecamatan wasuponda pemerintah sangat berperan aktif dan memberikan tugas kepada pelaksana penyuluh pertanian (PPL) yang harus terjun langsung untuk memberikan arahan-arahan kepada masyarakat baik dalam bentuk penyuluhan maupun dalam bentuk pendampingan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Arif (2012) mengatakan bahwa sebagai dinamisor pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika, pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan kepala desa Bapak Karim. P mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan

“ Ia menuturkan dengan adanya sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat melalui aparat pemerintah dalam memberikan penyuluhan sehingga para petani dapat mengetahui bagaimana cara pemberdayaan tanaman dan diterima dengan sangat baik oleh masyarakat agar pertanian kedepannya berjalan dengan lancar khususnya petani lada putih”(Hasil wawancara KRM, 2 Desember 2016).

masyarakat petani lada putih melalui pelaksanaan pelatihan yang diberikan pemerintah sangat berarti bagi masyarakat petani lada putih khususnya dalam meningkatkan keterampilan para petani dalam mengelola pertaniannya, dengan melalui penyuluhan dan pendampingan masyarakat akan lebih mengerti tentang cara-cara pengelolaan tanah yang baik, pengairan yang teratur, pemilihan bibit unggul, pengendalian hama penyakit, dan pengolahan pasca panen. Karena peran pemerintah lada putih kedepannya di kecamatan wasuponda.

Berikut hasil wawancara dengan warga masyarakat bernama Nawir di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda:

“saya selaku warga yang berprofesi sebagai petani lada putih senang sekali apabila ada penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di kecamatan alhamdulillah dengan adanya pelatihan tersebut banyak pengetahuan dan cara bertani yang saya ketahui dan saya sangat berterima kasih dengan adanya penyuluhan dan pendampingan di kecamatan wasuponda ini khususnya masyarakat petani lada putih”(Hasil wawancara NWR, 3 januari 2016).

Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan yang di lakukan oleh aparat pemerintah untuk petani sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan bentuk penyuluhan yang diberikan dapat berguna bagi petani kedepannya, khususnya petani lada putih.

Berikut hasil wawancara dengan warga masyarakat bernama Ganing di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur:

“Saya selaku warga yang berprofesi sebagai petani lada putih sangat senang dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pertanian. Adapun bantuan yang di berikan berupa pupuk dan kayu yang digunakan untuk menanam merica itu sangat membantu masyarakat petani dalam pengolahan lada putih”(Hasil wawancara GNG, 3 Januari 2016).

Dari hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis dapat di simpulkan bahwa pemberdayaan petani dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan sudah di lakukan oleh pemerintah setempat. Dengan adanya bantuan pupuk agar tanaman lada putih dapat menghasilkan lada putih yang berkualitas.

Berikut hasil wawancara dengan warga masyarakat bernama Syoimuddin H,Ahmad di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur:

“saya selaku masyarakat balambano yang berprofesi sebagai petani lada putih sangat senang dan bersyukur dengan adanya pemberdayaan ini dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan yang di lakukan oleh pemerintah daerah di kecamatan wasuponda ini. Setiap ada penyuluhan yang diberikan saya selalu menghadirinya dan pengetahuan yang diberikan sangat berguna dan bermanfaat untuk kesejahteraan khususnya petani lada putih”(Hasil wawancara SMD, 3 januari 2016).

Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk petani sangat di sambut gembira oleh masyarakat petani karena petani yakin bahwa dengan adanya penyuluhan dan pendampingan tersebut dapat meningkatkan hasil produksi para petani khususnya petani lada.

3. Peran Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Pengembangan Fasilitas Petani

Peran pemerintah dalam memberikan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Pemetintah kecamatan wasuponda melalui staf bidang

pertanian berusaha memfasilitasi para petani agar hasil produksi pertanian dapat meningkat. Peningkatan hasil adalah hal yang selalu di harapkan dalam kegiatan produksi pertanian. Berbicara suatu lokasi pertanian yang tetap maka upaya ini dekat dengan aspek intensifikasi pertanian. Pertanian adalah kegiatan peningkatan kualitas dan prasarana untuk meningkatkan hasil pertanian pada suatu daerah.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu warga di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur:

“saya selaku warga yang berprofesi sebagai petani lada putih sangat senang dalam pemberdayaan yang di lakukan oleh petani yang berbentuk fasilitas pengembangan petani seperti bantuan kayu yang digunakan untuk menanam lada itu sangat membantu masyarakat petani untuk dapat menghasilkan lada yang lebih banyak dan berkualitas”(Hasil wawancara GNG, 3 januari 2016).

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan petani dalam bentuk pengembangan fasilitas petani itu sudah dilakukan oleh pemerintah yang berupa bantuan kayu yang digunakan untuk membantu penanaman lada agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Petani Lada Putih Di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur

Tentunya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat petani lada putih pasti di pengaruhi oleh dua faktor yang pertama adalah faktor pendukung adalah faktor yang mendukung proses jalannya pemberdayaan kepada masyarakat petani lada putih yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang kedua adalah faktor pemnghambat yaitu faktor

yang menghambat proses jalannya pemberdayaan kepada masyarakat petani ladaputih yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung adalah faktor yang mendukung proses jalannya pemberdayaan kepada masyarakat petani lada putih yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam artian adalah faktor yang menunjang dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat petani lada putih sehingga pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah berjalan maksimal.

1) Adanya sarana dan prasarana

Berikut hasil wawancara dengan salah satu aparat dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur, yang membahas tentang faktor pendukung:

“Adanya dukungan sarana dan prasarana penyuluh, sehingga pemerintah dalam melakukan penyuluhan berjalan maksimal karena adanya dukungan sarana dan prasarana. Dan memang saat ini alhamdulillah sudah mulai bagus, diantara semua penyuluh yang ada disini yang diperlukan kebutuhan sarana prasarana misalnya motor semua punya sehingga kita bisa menjangkau di daerah-daerah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat petani lada putih.(Dra. Rosdiati, M.Said 29 desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa adanya dukungan bagi pemerintah dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat petani lada putih dengan adanya dukungan sarana dan prasarana sangat membantu masyarakat petani lada putih.

2) Adanya dukungan dana

Berikut hasil wawancara dengan salah satu aparat dinas pertanian kabupaten luwu timur, yang membahas tentang faktor pendukung.

“Alhamdulillah ada yang menunjang dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat petani lada putih di desa balambano kecamatan wasuponda, dalam setiap penyuluhan yang dilakukan dalam penyuluhan yaitu adanya dukungan dana dari pemerintah untuk melakukan penyuluhan dan pelatihan di berbagai desa khususnya di desa balambano kecamatan wasuponda ini”.(Dra. Rosdiati, M.Said 29 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa adanya dukungan bagi pemerintah dalam melakukan pemberdayaan di masyarakat khususnya petani lada putih misalnya adanya dukungan dana bantuan pupuk sehingga pemerintah menjalankan tugasnya bisa berjalan efektif.

Dari analisis wawancara diatas menunjukkan adanya faktor pendukung pemerintah dalam menjalankan fungsinya misalnya bantuan dana yang menunjang dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat yaitu faktor yang menghambat proses jalannya pemberdayaan kepada masyarakat petani lada putih yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

1) Partisipasi Masyarakat Petani Lada Putih

Berikut hasil wawancara dengan salah satu aparat dinas pertanian kabupaten luwu timur, yang membahas tentang faktor penghambat:

“Yang menghambat itu partisipasi kelompok tani, ini yang saya katakan tadi tidak semua kelompok tani atau yang melakukan penyuluhan kepada masyarakat itu mudah menerima jalannya pemberdayaan sekarang, misalnya kita sampaikan besok kita ada kegiatan penyuluhan bermitra dengan petani , tidak semua kelompok atau penyuluhan tersebut dengan mudah menerima dengan cepat. (Dra. Rosdiati, M.Said 29 Desember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa faktor penghambat bagi pemerintah dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat petani lada putih yang menghambat itu partisipasi. Misalnya tidak semua badan penyuluh mau menerima dengan mudah adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani lada putih adalah memberikan penyuluhan dan pelatihan, memberikan bantuan yang baik berupa pupuk dan tiang sehingga mencapai hasil produksi yang cukup baik.
2. Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani lada putih dalam hal ini dinas pertanian kabupaten luwu timur, staf bidang pertanian, kepala kecamatan, kepala desa dan masyarakat.
3. peran pemerintah daerah dalam hal ini dinas pertanian sudah memberikan bentuk pemberdayaan berupa penyuluhan dan pelatihan agar senantiasa memnatau, mendampingi dan meberukan pelatihan seperti bagaimana cara memilih bibit yang unggul, bagaimana peneman yang baik dan bagaimana jarak penanaman dari tiang pohon yang satu dengan yang lainnya.
4. Faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat petani lada putih di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur. Adapun faktor pendukung adalah adanya sarana dan prasarana dan adanya dana atau biaya operasional.

Dan yang mengambat adalah kurangnya partisipasi antara pemerintah dan badan penyuluh dalam melaksanakan pemberdayaan di masyarakat.

B. Saran-saran

1. Para pemerintah daerah harus berperan aktif sampai lembaga terkecil tiap desa agar terciptanya kesejahteraan masyarakat petani lada putih.
2. Pemerintah harus memperhatikan masyarakatnya khususnya petani lada putih karena potensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sangat besar.
3. Harus lebih meningkatkan kualitas pendidikan yang dimiliki para aparat pemerintah yang memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat. Para pertanian harus berperan aktif agar semua masyarakat petani lada putih mendapatkan pelatihan dan memanfaatkan ilmu yang didapat dengan baik sehingga petani lada putih menghasilkan produksi yang lebih tinggi.
4. Pemerintah harus melakukan pemberdayaan kepada masyarakat petani lada putih baik dalam hal penyuluhan dan pelatihan harus maksimal sehingga bisa meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mampu dan bisa meningkatkan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul R. Saliman. 2011. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Anwas, M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Korten, David C dan Syahrir. 1980. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sarpian T. 2000. *Lada*. Jakarta: PT Penebar Swadaya.
- Seokanto, Soerjono. 1990. *Implenentasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: ZR, Lestiaza.
- Siagian P, Sondang. 2009. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Somodiningrat. 2004. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Edisi Kedua, Bina Rena Pariwar.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tim Prima Pena.2000. *Kamus Ilmiah Populer*. Jakarta: Gitamedia Pers.
- Wirotomo. 2003. *Paradigma Pembengunan di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: CV Cipruy.

B. Undang-Undang

- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 dalam pasal 1, *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 *Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Dibidang Pertanian*.

C. Sumber Internet

Allred, Wendi. 2011. *Manfaat Lada Marica*. Diakses melalui <http://ummurizka.wordpress.com/2011/01/28/khasiat-marica>, Pada tanggal 2 Juni 2015.

Ramli, Rosdiana. 2014. Diakses Melalui <file:///D:/jurnal/lada-ciri-ciri-tanaman-lada-serta-khasiat-dan-manfaat-lada.html> Pada tanggal 2 Juni 2015.

Syafiie. 2002. *Istilah Ilmu Pemerintah*. Diakses melalui <http://site.google.com/site>, Pada tanggal 2 Juni 2015.

Ujang. 2011. *Manfaatt Lada Marica*. Diakses melalui <http://healthy-cure.blogspot.com/2010/09/khasiat-marica-buat-kesehatan-manfaat.html>, Pada tanggal 2 Juni 2015.

